

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG (099075)

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Semester II Tahun 2023 - AUDITED



Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung

Lebak - Banten 42314

Telp. 0252201057 Fax. 0252201057

e-mail : info@pn-rangkasbitung.go.id



**LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
099075**

**Untuk Periode Semester II Tahun 2023
BAGIAN ANGGARAN 005.03
BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung
Telp. 0252201057 Fax. 0252201057
Lebak - Banten 42314
e-mail : info@pn-rangkasbitung.go.id**

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Lebak, 10 April 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

DARSONO, S.H.
NIP. 196607091989031002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iiiv
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	144
II. Neraca	166
III. Laporan Operasional	177
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	188
V. Catatan atas Laporan Keuangan	20
A. Penjelasan Umum	20
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Rangkasbitung	20
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	21
A.3. Basis Akuntansi	21
A.4. Dasar Pengukuran	21
A.5. Kebijakan Akuntansi	22
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	30
B.1. Pendapatan	30
B.2. Belanja	31
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	32
C.1.1 Persediaan	32
C.2.1 Ekuitas	33
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	33
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	33
D.2. Beban Persediaan	33
D.3. Beban Barang dan Jasa	34
D.4. Beban Perjalanan Dinas	34

E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
E.1.	Ekuitas Awal	35
E.2.	Surplus (defisit) LO	35
E.3.	Koreksi Nilai Persediaan	46
E.4.	Transaksi Antar Entitas	35
E.5.	Ekuitas Akhir	35
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	36
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	36
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	36

Laporan-laporan Pendukung

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung Lebak - Banten 42314

Telp. 0252201057 Fax. 0252201057 e-mail : info@pn-rangkasbitung.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lebak, 10 April 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



DARSONO, S.H.

NIP. 196607091989031002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan 213/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 27.096.000,- atau mencapai 118,20% dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 22.924.000,-.

Realisasi Belanja Negara Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 117.369.500,- atau mencapai 98,88% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 118.700.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2023.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan 213/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 Per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan Aset sebesar Rp. 4.237.300,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 4.237.300,.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 0,-.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 4.237.300,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 27.096.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 121.314.546,- sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 94.218.546,-). Pendapatan Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp. 0, Beban Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 0,- dan surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp. 0,-). sehingga mengalami (defisit) -LO sebesar (Rp. 94.218.546,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 1.219.425,- dikurangi (defisit)-LO sebesar (Rp. 94.218.546,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0. dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.

97.236.421,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 4.237.300,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Per 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	Per 31 Desember 2023			31 Desember 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A Pendapatan Negara dan Hibah					
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	A.1	22.924.000	27.096.000	118,20	25.691.000
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		22.924.000	27.096.000	118,20	25.691.000
B Belanja Negara					
1. Belanja Pegawai	B.1	0	0	0,00	0
2. Belanja Barang	B.2	118.700.000	117.369.500	98,88	99.907.000
3. Belanja Modal	B.3	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja Negara		118.700.000	117.369.500	98,88	99.907.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Persediaan	C.1.1	4.237.300	1.219.425
Jumlah Aset Lancar		4.237.300	1.219.425
Jumlah Aset		4.237.300	1.219.425
EKUITAS			
Ekuitas	C.2	4.237.300	1.219.425
Jumlah Ekuitas		4.237.300	1.219.425
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		4.237.300	1.219.425

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
	D.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.1	27.096.000	25.691.000
Jumlah Pendapatan		27.096.000	25.691.000
Beban			
	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	0	0
Beban Persediaan	D.2.2	21.940.546	28.104.093
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	62.788.000	43.515.000
Beban Pemeliharaan	D.2.4	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	36.586.000	38.495.000
Jumlah Beban		121.314.546	110.114.093
(Defisit) dari Kegiatan Operasional		(94.218.546)	(84.423.093)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Pos Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(94.218.546)	(84.423.093)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Ekuitas Awal	E.1	1.219.425	3.567.200
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E.2	(94.218.546)	(84.423.093)
Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas	E.3	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.4	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.6	0	0
Transaksi Antar Entitas	E.7	97.236.421	82.075.318
Kenaikan/penurunan ekuitas		3.017.875	(2.347.775)
Ekuitas Akhir		4.237.300	1.219.425

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

*V. CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Pengadilan Negeri Rangkasbitung didirikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung diatur dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Rangkasbitung terletak di Jalan RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung Kab. Lebak-Banten.

Visi Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah "MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG YANG AGUNG" Visi sendiri memiliki pengertian suatu pernyataan mengenai tujuan dari organisasi yang disampaikan atau diekspresikan melalui pelayanan yang ditawarkan, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai yang didapatkan juga aspirasi dan cita-cita dimasa yang akan datang.

Misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Peradilan dalam peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan manajemen Peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Rangkasbitung melakukan beberapa langkah-langkah strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian Perkara
2. Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara
4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Acces to Justice)
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
6. Meningkatkan kualitas Pengawasan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester 1 Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu Rangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Rangkasbitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai

wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester 1 Tahun Anggaran 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,

dikeluarkan dari neraca pada saatada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsur yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan aset yang dibatasi penggunaannya. KM.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu

lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp.
27.096.000

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 27.096.000 atau mencapai 118,20% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 22.924.000. Pendapatan Pengadilan Negeri Rangkasbitung terdiri dari Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan, Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNB (Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	50.000	30.000	60,00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	10.000	920.000	9.200
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	4.210.000	4.400.000	104,51
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	18.654.000	21.746.000	116,58
Total Pendapatan		22.924.000	27.096.000	118,20

- Realisasi Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan mengalami kenaikan sebesar 5,19% dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2022.
- Realisasi Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan mengalami kenaikan sebesar 64,13% dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2022.
- Realisasi Pendapatan Ongkos Perkara mengalami penurunan sebesar (33,86%) dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2023.
- Realisasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya mengalami kenaikan sebesar 10,65% dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2023.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 dan 2022 (Rupiah)

No	Uraian	2023	2022	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	30.000	40.000	(33,33)
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	920.000	330.000	64,13
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	4.400.000	5.890.000	(33,86)
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	21.746.000	19.431.000	10,65
Total Pendapatan		27.096.000	25.691.000	5,19

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja: Rp.
117.369.500

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 117.369.500,- atau sebesar 98,88% dari anggaran senilai Rp. 118.700.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023

Uraian	Periode 31 Desember 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	118.700.000	117.369.500	98,88
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	118.700.000	117.369.500	98,88
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	118.700.000	117.369.500	98,88

Kondisi realisasi belanja periode Semester II Tahun 2023 atau per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Semester II Tahun 2022 diantaranya sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar 14,88% dari realisasi belanja barang periode 31 Desember 2022.
2. Terdapat kenaikan pagu anggaran antara tahun 2023 dengan 2022 sebesar kenaikan 14,83%

Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	117.369.500	99.907.000	14,88
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja	117.369.500	99.907.000	14,88

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
117.369.500

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Rangkasbitung Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 117.369.500 dan Rp. 99.907.000. Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 14,88% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain pada tahun 2024 ada kenaikan pagu anggaran.

Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian			31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Belanja	Barang	Operasional	603.000	516.000	14,43
Belanja	Barang	Non Operasional	30.985.000	11.799.000	61,92
		Belanja Jasa	31.200.000	31.200.000	0,00
		Belanja Perjalanan Dinas	36.586.000	38.495.000	(5,22)
		Belanja Barang Persediaan	17.995.500	17.897.000	0,55
Total Belanja Brutto			117.369.500	99.907.000	14,88
		Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto			117.369.500	99.907.000	14,88

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Persediaan
Rp. 4.237.300

C.1.1 Persediaan

Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.237.300 dan Rp. 1.219.425. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(RP)	(RP)
Barang Konsumsi	4.237.300	1.219.425
Total	4.237.300	1.219.425

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, sesuai dengan Berita Acara Stock Opname Fisik Semester II Tahun 2023 No. 76/SEK.W29.U3/PL1.2.7/I/2024 tanggal 2 Januari 2024

C.2. Ekuitas

Ekuitas:
Rp. 4.237.300

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.237.300 dan Rp. 1.219.425. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP : Rp.
27.096.000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 27.096.000 dan Rp. 25.691.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	30.000	40.000	(33,33)
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitea Badan Peradilan	920.000	330.000	64,13
Pendapatan Ongkos Perkara	4.400.000	5.890.000	(33,86)
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	21.746.000	19.431.000	10,65
Total Pendapatan	27.096.000	25.691.000	5,19

D.2. Beban Persediaan

Beban
Persediaan : Rp.
21.940.000

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 27.940.000 dan Rp. 28.104.093. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Persediaan Konsumsi	27.940.000	28.104.093	(0,59)
Total	27.940.000	28.104.093	(0,59)

D.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa : Rp. 62.788.000

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 62.788.000 dan Rp. 43.515.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya meningkatnya kebutuhan biaya operasional perkantoran dan beban jasa lainnya. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	603.000
Beban Bahan	30.985.000
Beban Jasa Lainnya	31.200.000
Total Beban barang dan jasa	62.788.000

D.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp. 36.586.000

Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 36.586.000,- dan Rp. 38.495.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. perjalanan dinas dalam rangka pemberitahuan penetapan hari sidang, pemberitahuan penahanan dan perpanjangan penahanan, dan pemberitahuan salinan/petikan putusan. Rincian Beban Perjalanan untuk 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000
Total Beban Perjalanan Dinas	750.000

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal: Rp. 1.219.425,- Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.219.425,- dan Rp. 3.567.200,-

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : (Rp. 94.218.546,-) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp. 94.218.546) dan (Rp. 84.423.093). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan: Rp. 0,- Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas: Rp. 97.236.421,- Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 97.236.421,- dan Rp. 82.075.318,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Rp. 4.237.300,- Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.237.300 dan Rp. 1.219.425,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Dari Tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 tidak ada kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Periode 31 Desember 2023 tidak terdapat pendapatan dan belanja secara akrual.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah:

1. BRI Cab. Rangkasbitung virtual account 654440990751000 a.n. BPG: 161 PN RKBT 099075 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0.
2. BTN Cabang Cilegon nomor rekening 0004701300007813 a.n RPL 161 PDT PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG UNTUK BIAYA PERKARA. Dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 25.695.174.922,30

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ketiga

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara per 31 Desember 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Biaya Perkara Rp. 55.795.463,-
2. Biaya Konsinyasi Rp. 25.632.563.859,30
3. Biaya Eksekusi Rp. 19.823.000,-

F.2.5. Revisi DIPA

1. Revisi DIPA Ke 01 Tanggal 10 Februari 2023 tentang Updating Halaman III DIPA Rencana Penarikan Dana Triwulan I;
2. Revisi DIPA Ke 02 Tanggal 06 April 2023 tentang Updating Halaman III DIPA Rencana Penarikan Dana Triwulan II;
3. Revisi DIPA Ke 03 Tanggal 12 Juli 2023 tentang Updating Halaman III DIPA Rencana Penarikan Dana Triwulan III;
4. Revisi DIPA Ke 04 Tanggal 01 November 2023 tentang Updating halaman III DIPA Rencana Penarikan Dana Triwulan IV dan Penambahan Pagu Anggaran.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

- ✓ Tidak ada kegiatan Ralat SPM, SSBP dan SSPB pada periode Semester II Tahun 2023

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

LAPORAN PENDUKUNG



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
Jln. R.A. Kartini No. 55 Telp./Fax. (0252) 201057 Rangkasbitung - Lebak 42314
website: www.pn-rangkasbitung.go.id e-mail: info@pn-rangkasbitung.go.id

BERITA ACARA STOCK OPNAME FISIK SEMESTER II TAHUN 2023
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG (099075)
Nomor : 76 /SEK.W29.U3/PL1.2.7/II/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : DARSONO, S.H
NIP : 196607091989031002
Jabatan : Sekretaris (Kuasa Pengguna Barang)
- II. Nama : AGUS MULYADI, S.Sos
NIP : 197908272006041004
Jabatan : Kasubbag. Umum & Keuangan (Pengelola Barang Persediaan)

Menyatakan bahwa telah melakukan **stock opname** barang persediaan periode Semester II Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut :

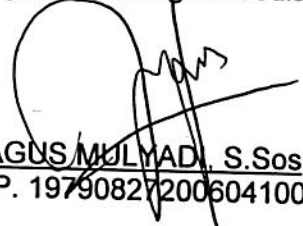
KODE	URAIAN	JML BRG
1	2	3
1010301001-000001	Pulpen Gel Kenko Boxes	10 boxes
1010301001-000003	Pulpen Standard AE7 Fine	10 boxes
1010301002-000001	Penjepit Kertas Binder Clips No.260	3 boxes
1010301004-000001	Penghapus/Korektor Tip-Ex	13 pcs
1010301005-000001	Buku Tulis Folio 200	2 pcs
1010301005-000003	Buku Ekspedisi	5 pcs
1010301008-000001	Cutter Besar	9 pcs
1010301008-000003	Gunting Besar	1 pcs
1010301010-000003	Alat Perekat Isolatip Putih Besar	5 pcs
1010301010-000011	Alat Perekat Double Tape Sedang	3 pcs
1010301012-000001	Staples Kecil	11 pcs
1010301012-000002	Staples Besar	13 pcs
1010301013-000005	Isi Staples Kecil Boxes	18 boxes
1010301013-000006	Isi Staples Besar Boxes	12 boxes
1010302001-000002	Kertas HVS F4 80 gr	4 rim
1010302001-000003	Kertas HVS Warna	5 rim
1010302002-000007	Post It Mark & Note Besar	10 pcs
1010302002-000009	Post It Warna Warni Kecil	14 pcs
1010302003-000002	Kertas Cover Jilid	3 pak
1010303002-000011	Tinta Canon Epson 664	8 buah
1010303004-000001	Catridge Canon Warna	1 pcs
1010303004-000003	Tinta Cetak Data Print DP-41	1 pcs
1010303004-000011	Tinta E-Print Canon Botol Hitam	5 pcs
1010304001-000001	Benang Kasur	8 pcs

Demikian Berita Acara stock opname ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.


Mengetahui/Menyetujui :
Kuasa Pengguna Barang

DARSONO, S.H.
NIP. 196607091989031002

Pengelola Barang Persediaan


AGUS MULJADI, S.Sos
NIP. 197908272006041004

**RINCIAN NILAI KAS DI KASIR
PER 31 DESEMBER 2023**

BA : Mahkamah Agung RI (005)
Eselon I : Badan Peradilan Umum (03)
Wilayah : Banten (29.00)
Satker : Pengadilan Negeri Rangkasbitung (099075)

No	Wilayah	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2023				Ket	
					Tunai	Kuitansi Belum UP	Saldo Bank			Total
Bank dan No Rek	Saldo									
1	Banten	2900	099075	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	Rp13.007.400	-	BTN Cabang Cilegon / 0004701300007813	Rp 25,695,174,922	Rp25,708,182,322	

Rangkasbitung, 17 Januari 2024
Sekretaris


Darsono, S.H.
NIP. 196607091989031002

**RINCIAN NILAI KAS LAINNYA SETARA KAS
PER 31 DESEMBER 2023**

BA : Mahkamah Agung RI (005)
 Eselon I : Badan Peradilan Umum (03)
 Wilayah : Banten (29.00)
 Satker : Pengadilan Negeri Rangkasbitung (099075)

No	Wilayah	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2023			Ket
					Tunai	Saldo Bank	Total	
					Saldo	Bank dan No Rek	Total	
1	Banten	2900	099075	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	Rp -	Rp -	-	Rp -

Rangkasbitung, 17 Januari 2024
 Sekretaris


 Darsono, S.H.

NIP. 196607091989031002

**REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA
PER 31 DESEMBER 2023**

BA : Mahkamah Agung RI (005)
 Eselon I : Badan Peradilan Umum (03)
 Wilayah : Banten (29.00)
 Satker : Pengadilan Negeri Rangkasbitung (099075)

No	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir		Ket	
					Jumlah	Bank		Brankas
1	Biaya Perkara	Rp 50,094,463	Rp 15,038,000	Rp 9,337,000	Rp 55,795,463	Rp 42,788,063	Rp 13,007,400	
2	Biaya Eksekusi	Rp 30,783,000	Rp -	Rp 10,960,000	Rp 19,823,000	Rp 19,823,000	Rp -	
3	Biaya Konsinyasi	Rp 25,632,563,859	Rp -	Rp -	Rp 25,632,563,859	Rp 25,632,563,859	Rp -	
	Jumlah	Rp 25,713,441,322	Rp 15,038,000	Rp 20,297,000	Rp 25,708,182,322	Rp 25,695,174,922	Rp 13,007,400	

Rangkasbitung, 17 Januari 2024

Sekretaris


Darsono, S.H.

NIP. 196607091989031002



**RINCIAN NILAI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2023**

BA : Mahkamah Agung RI (005)
 Eselon I : Badan Peradilan Umum (03)
 Wilayah : Banten (29.00)
 Satker : Pengadilan Negeri Rangkasbitung (099075)

No	Wilayah	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2023			Ket		
					Tunai	Kuitansi Belum UP	Saldo Bank Bank dan No Rek		Saldo	Total
1	Banten	2900	099075	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	Rp -	Rp -	BRI Cab Rangkasbitung / 654440990751000	Rp -	Rp -	

Rangkasbitung, 17 Januari 2024
 Sekretaris


Darsono, S.H.
 NIP. 196607091989031002



**RINCIAN NILAI KAS DI BENDAHARA PENERIMA
PER 31 DESEMBER 2023**

BA : Mahkamah Agung RI (005)
 Eselon I : Badan Peradilan Umum (03)
 Wilayah : Banten (29.00)
 Satker : Pengadilan Negeri Rangkasbitung (099075)

No	Wilayah	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2023			Ket	
					Tunai	Saldo Bank			
						Saldo	Bank dan No Rek	Total	
1	Banten	2900	099075	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	Rp -	Rp -	-	Rp -	Tidak memiliki rekening

Rangkasbitung, 17 Januari 2024

Sekretaris



 Darsono, S.H.
 NIP. 196607091989031002



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Jl. RA. KARTINI NO. 55 TLP. 201057 - 201671

RANGKASBITUNG

htt://www.pn-rangkasbitung.go.id/email: info@pn-rangkasbitung.go.id

LEBAK – BANTEN, 42313

BERITA ACARA REKONSILIASI

KAS KEUANGAN PERKARA

NOMOR : W29.U3/ 37 /HT.04.13/XII/2023

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** telah dilakukan rekonsiliasi kas keuangan perkara dengan uraian sebagai berikut :

Menurut Buku

I	Buku Induk Keuangan Perkara Perdata		
	a. Saldo awal Bulan Desember 2023	: Rp.	50.094.463,00
	b. Penerimaan	: Rp.	15.038.000,00
	c. Pengeluaran	: Rp.	9.337.000,00
	Jumlah I		Rp. 55.795.463,00
II	Buku Keuangan Konsinyasi		
	a. Saldo awal bulan Desember 2023	: Rp.	25.632.563.859,30
	b. Penerimaan	: Rp.	0,00
	c. Pengeluaran	: Rp.	0,00
	Jumlah II		Rp. 25.632.563.859,30
III	Buku Keuangan Eksekusi		
	a. Saldo awal bulan Desember 2023	: Rp.	30.783.000,00
	b. Penerimaan	: Rp.	0,00
	c. Pengeluaran	: Rp.	10.960.000,00
	Jumlah III		Rp. 19.823.000,00

Saldo Pembukuan (I+II+III) **Rp. 25.708.182.322,30**

Menurut Kas :

1. Uang tunai	: Rp.	13.007.400,00
2. Saldo Bank	: Rp.	25.695.174.922,30
3. Materai	: Rp.	0,00
Saldo kas	:	Rp. 25.708.182.322,30
Selisih (saldo pembukuan-saldo kas)		Rp. 0

Staf Kepaniteraan Perdata/kasir

DESTRIA, S.H.

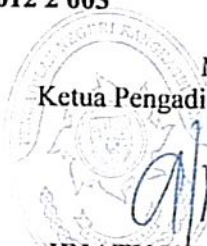
NIP. 19971221 202012 2 003

Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung

AHMAD LETONDOT BASARIN, S.H., M.H.

NIP. 19801221 200502 1 001

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung



IRIATY KHAIRUL UMMAH, S.H.

NIP.19790917 200212 2 003

BERITA ACARA REKONSILIASI KAS
KEUANGAN PERKARA
BULAN DESEMBER 2023

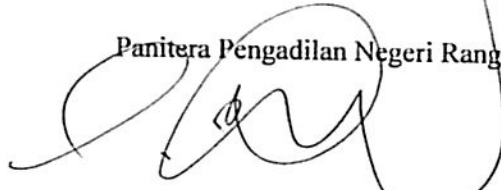
Kas Tunai	:			Rp. 13.007.400,00
Terdiri dari (perincian)	:			
Uang Kertas Rp.100.000	:	130	Lembar	= Rp. 13.000.000
Uang Kertas Rp. 50.000	:	0	Lembar	= Rp. 0
Uang Kertas Rp 20.000	:	0	Lembar	= Rp. 0
Uang Kertas Rp. 10.000	:	0	Lembar	= Rp. 0
Uang Kertas Rp 5.000	:	1	Lembar	= Rp. 5000
Uang Kertas Rp 2.000	:	1	Lembar	= Rp 2000
Uang Kertas Rp 1.000	:	0	Lembar	= Rp 0
Uang Logam Rp 1.000	:	0	Lembar	= Rp 0
Uang Logam Rp. 500	:	0	Keping	= Rp. 0
Uang Logam Rp. 200	:	2	Keping	= Rp. 400
				Rp.13.007.400,00
Meterai Rp. 10.000,-		0	Lembar	= Rp. 0

Staf Kepaniteraan Perdata/kasir



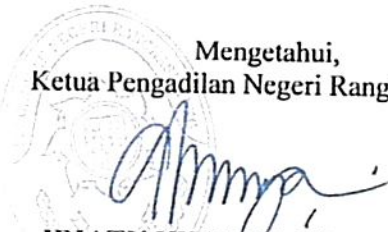
DESTRIA, S.H.
NIP. 19971221 202012 2 003

Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung



AHMAD LETONDOT BASARIN, S.H., M.H.
NIP. 19801221 200502 1 001

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung



IRIATY KHAIRUL UMMAH, S.H.
NIP.19790917 200212 2 003

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax: 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
DITJEN BADAN PERADILAN UMUM (03)
PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG (099075)
Rekening Induk : RKK DITJEN BADILUM O (023001xxxxxx304)
Virtual Account : 65444090751000 | BPG161 PN RKB1 099075
Periode : 01-12-2023 s/d 31-12-2023

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-04	09:06:00	22037269	Penggantian uang persediaan RM untuk keperluan belanja barang. 231611301006341000001	0,00	0,00	4.806.000,00	4.806.000,00	SPAN	
2023-12-04	14:19:46	22081617	spr	4.806.000,00	4.806.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-12-04	09:42:19	22537610	Penggantian uang persediaan RM untuk keperluan belanja barang. 231611301006579000001	0,00	0,00	4.678.500,00	4.678.500,00	SPAN	
2023-12-07	11:12:10	22557541	spr	4.678.500,00	4.678.500,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-12-08	12:52:00	22774236	Penggantian uang persediaan RM untuk keperluan belanja barang. 231611301006712000001	0,00	0,00	4.196.000,00	4.196.000,00	SPAN	
2023-12-08	14:56:44	22804981	sppr 08 des 2023	4.196.000,00	4.196.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		13.680.500,00	13.680.500,00			
			Saldo Akhir				0,00		

Transaction History

Company : PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
 Account : 0004701300007813 - RPL 161 PDT PENGADIL
 Account Organization Unit : KC CILEGON
 Period : 01-Dec-2023 - 31-Dec-2023
 Starting Balance : IDR 25,705,136,922.30
 Ending Balance : IDR 25,695,174,922.30
 Total Transaction Debit : 1
 Total Transaction Credit : 18
 Page : 1 of 1

No.	Posting Date	Posting Time	EIF Data	EIF Time	Description	Debit	Credit	Balance	Ref No.
1	1/1/12	11:24:20	01/12	11:24:20	0098899782223120001 DIKI MAULANA DR AHMAD DIMYAT BANK BCA ACMB9503 6019009505722345 000000772878	0.00	580,000.00	25,705,716,922.30	23120193000350858951
2	1/1/12	15:34:06	01/12	15:34:06	98899782223120003 PT BANK RAKYAT INDONES DR 0000000006470534263 CHAJRUNISA 000035843513 BCA	0.00	56,000.00	25,705,772,922.30	23120196219997804570
3	1/4/12	13:46:37	04/12	13:46:37	98899782223120004 SITI DR 0000000005421309354 SITI HABIBAH 000047134303 BCA	0.00	110,000.00	25,705,882,922.30	23120496219998189344
4	1/4/12	13:53:07	04/12	13:53:07	98899782223120005 UJANG DR 0000000005421309354 SITI HABIBAH 000047164879 BCA	0.00	110,000.00	25,705,992,922.30	23120496219998189987
5	1/4/12	15:40:34	04/12	15:40:34	98899782223120006 YOVY APRILAH SH DR 0000000005421309354 SITI HABIBAH 000047667723 BCA	0.00	14,500.00	25,706,007,422.30	23120496219998200076
6	1/5/12	14:41:35	05/12	14:41:35	0098899782223120008 ANDI TJAHJADY SH DR ANDI TJAHJAD BANK BCA G997Z5TT 5260512016241786 000000002481	0.00	331,500.00	25,706,338,922.30	23120593000380659490
7	1/7/12	14:05:12	07/12	14:05:12	BIAYA PK PERKARA NO 06/PDT.G/2021/PN.RKB	0.00	7,642,000.00	25,713,980,922.30	23120700095680000115
8	1/8/12	10:49:01	08/12	10:49:01	0098899782223120009 BOB HASAN AND PARTNE DR FARID MUADZ BANK BCA G997Z543 5307952056422828 000000008421	0.00	130,000.00	25,714,110,922.30	23120893000340170460
9	1/1/12	10:48:28	11/12	10:48:28	CEK TO 865198 1871116112970008 DESTRIA	25,000,000.00	0.00	25,689,110,922.30	23121100095680000085
10	7/1/12	05:17:25	17/12	05:17:25	0098899782223120010 HARRY RIANDASH DR HARRY RIANDA BANK BCA ACMB9503 5260512014445603 000000933330	0.00	393,000.00	25,689,503,922.30	23121793000290455837
11	8/1/12	10:14:18	18/12	10:14:18	98899782223120012 AMEH DR 0000000005421309354 SITI HABIBAH 000000742693 BCA	0.00	110,000.00	25,689,613,922.30	23121896219999759587
12	8/1/12	15:04:21	18/12	15:04:21	98899782223120013 RADIAN ZIKRI SH DR 0000000002290197794 RADIAN ZIKRI SH 000001987007 BCA	0.00	110,000.00	25,689,723,922.30	23121896219999778158
13	1/1/12	14:05:32	21/12	14:05:32	7788 PJR 98899782223120015 PANJAH BIAYA 1405321221000020000015211000055231221	0.00	724,000.00	25,690,447,922.30	23122100095680000055
14	1/7/12	13:58:09	27/12	13:58:09	DR YUDI SUTIRA BANK BCA 5307952079682507 ATM G997ZCY1 REF 000000000349	0.00	1,710,000.00	25,692,157,922.30	23122793000370779683
15	1/7/12	14:08:00	27/12	14:08:00	0098899782223120016 HERI MUFTI DR DIKI MAULANA BANK BCA ACMB9503 5307952072779391 000000550528	0.00	1,012,000.00	25,693,169,922.30	23122793000380883285
16	1/8/12	12:32:28	28/12	12:32:28	98899782223120017 DIKI MAULANA DR 0000000005420413001 AHMAD DIMYATI 000033368884 BCA	0.00	42,500.00	25,693,212,422.30	23122896219991802051
17	1/8/12	18:14:36	28/12	18:14:36	98899782223120018 HENDRI YANSYAH STSHMH DR 0000000007110876666 HENDRI YANSYAH 000040967350 BCA	0.00	39,000.00	25,693,251,422.30	23122896219991834987
18	1/9/12	10:10:26	29/12	10:10:26	BIAYA PENINJAUAN SETEMPAT	0.00	1,910,000.00	25,695,161,422.30	23122900095680000028
19	1/9/12	11:42:03	29/12	11:42:03	98899782223120020 RADIAN ZIKRI SH DR 0000000002290197794 RADIAN ZIKRI SH 000043691270 BCA	0.00	13,500.00	25,695,174,922.30	23122996219991038026
Total						25,000,000.00	15,038,000.00		

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN TAHUN 2023**

Kode dan Nama UAKPA : (097577) Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Kode dan Nama UAPPAW : (29.03) Pengadilan Tinggi Banten

Kode dan Nama Eselon 1 : (03) Badan Peradilan Umum

Kode dan Nama K/L : (005) Mahkamah Agung RI

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
To Do List		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak	Seharusnya

1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNPB		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal			
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/19/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak

13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya		√	Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar		√	Ya

3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos-pos LO		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Pengecekan Pos-pos LPE		Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	√		Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST				
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya

PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)

Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya

TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Pyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			Ya

Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak

TELAAH LK BLU

LPSAL BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	√		Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		√	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	√		Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	√		Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	√		Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	√		Ya

LAK BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	√		Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	√		Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	√		Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	√		Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	√		Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	√		Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	√		Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

*Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

MACHMUD KHUSAERI, S.H.
NIP. 199002162009121001

Rangkasbitung, 17 Januari 2024
Penelaah,

DARSONO, S.H.
NIP. 196607091989031002